PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUGENG HARIADI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 26 Februari 2026;

Pihak Kedua,

KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

(SUGENG HARIADI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
TAHUN 2026

A. **TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026**

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. **DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. **KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	75%
2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	63%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	91%

Dipindai dengan CamScanner

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	85%
3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	82%
4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	85%
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	82%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 396.356.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 7.736.441.000
Jumlah		Rp 8.132.797.000

D. **PRIORITAS NASIONAL**

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. **KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Jambi, 26 Februari 2026,

Pihak Kedua,

...JAKSAAN TINGGI JAMBI

...NG HARIADI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BATANG HARI

(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	RONY KURNIAWAN, S.H.
Jabatan	:	KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.
Jabatan	:	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 26 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI,	KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BB,
(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)	(RONY KURNIAWAN, S.H.)

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi	Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset	91%
		Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	91%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	91%

Dipindai dengan CamScanner

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern	Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan	4,1
		Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara	4,1
		Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi	4,1

No	Kegiatan	Anggaran
1	PEMELIHARAAN	Rp 100.000.000
2	PEMUSNAHAN	Rp 60.000.000
3	PENYELESAIAN BARANG BUKTI/SITAAN/ RAMPASAN	Rp 100.000.000
Jumlah		Rp 260.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 26 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI	KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BB,
(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)	(RONY KURNIAWAN, S.H.)

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	TITO SUPRATMAN, S.H.
Jabatan	:	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.
Jabatan	:	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 26 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI,	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,
(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)	(TITO SUPRATMAN, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan	81%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi	89%
2	Meningkatnya penegakan hukum yang yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	63%
3	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System	86%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,7
5	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra Penuntutan	Rp 3.915.000
2	Penuntutan	Rp 42.042.000
3	Eksekusi	Rp 3.150.000
4	Restorative Justice	Rp 1.769.000
Jumlah		Rp 50.876.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 26 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI,	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,
(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)	(TITO SUPRATMAN, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	BILLIE C. SITOMPUL, S.H., M.H.
Jabatan	:	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.
Jabatan	:	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 26 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS,
(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)	(BILLIE C. SITOMPUL, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	63%
2	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	78%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	85%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	52%
		Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	76%
3	Meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	28%
		Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)	36%
4	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System	86%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,7
6	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	PENYELIDIKAN	Rp 5.965.000
2	PENYIDIKAN	Rp 20.244.000
3	PRA PENUNTUTAN	Rp 1.026.000
4	PENUNTUTAN	Rp 8.177.000
5	EKSEKUSI	Rp 382.000
	Jumlah	Rp 35.794.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 26 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS,
(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)	(BILLIE C. SITOMPUL, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	MICHAEL Y.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.
Jabatan	:	KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.
Jabatan	:	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 26 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI,	KEPALA SEKSI INTELIJEN,
(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)	(MICHAEL Y.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan	Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum	84%
		Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum	3,7

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	83%
3	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Batang Hari	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan	Rp 940.000
2	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp 2.707.000
3	Kampanye Anti Korupsi	Rp 1.837.000
4	Penerangan Hukum	Rp 1.865.000
5	Jaksa Masuk Sekolah	Rp 10.460.000
6	Jaksa Menyapa	Rp 18.880.000
	Jumlah	Rp 36.689.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 26 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI,	KEPALA SEKSI INTELIJEN,
(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)	(MICHAEL Y.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	MULKAN BALYA, S.H.
Jabatan	:	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.
Jabatan	:	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 26 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI,	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA,
(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)	(MULKAN BALYA, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara	Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer	100%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi	Indeks Persepsi atas pelayanan hukum	3,7

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Jaksa Pengacara Negara		
3	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	81%
		Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	81%
4	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	81%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)	3,7
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,7
7	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Batang Hari.	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Perkara Perdata dan TUN	Rp 5.657.000
2	Pelayanan Hukum Gratis	Rp 1.350.000
3	Pertimbangan Hukum	Rp 445.000
4	Pengelolaan HALO JPN	Rp 1.125.000
5	Pendampingan Pengelolaan Dana Desa	Rp 4.420.000
	Jumlah	Rp 12.997.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 26 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI,	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA,
(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)	(MULKAN BALYA, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	MOH ZULKARNAIN YUSUF, S.H., M.M.
Jabatan	:	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.
Jabatan	:	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 26 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI,	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,
(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)	(MOH ZULKARNAIN YUSUF, S.H., M.M.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Batang Hari	95,5
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Batang Hari	90,25
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI	Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	85%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan Negeri Batang Hari	3,7
5	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan	65%
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Batang Hari	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Operasional dan pemeliharaan kantor	1.719.457.000
2	Gaji dan tunjangan	6.016.984.000
	Jumlah	7.736.441.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 26 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI,	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,
(MUHAMMAD IRWAN, S.H., M.H.)	(MOH ZULKARNAIN YUSUF, S.H., M.M.)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Santi Apriani, S.H.
Jabatan	:	Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian Dan Keuangan Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Moh Zulkarnain Yusuf, S.H., M.M.
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Pembinaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 06 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Pembinaan	Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian Dan Keuangan Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Moh Zulkarnain Yusuf, S.H., M.M.)	(Santi Apriani, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI	Persentase layanan umum kepegawaian sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan pengembangan kepegawaian sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan kepangkatan dan mutasi kepegawaian sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Persentase layanan pemberhentian dan pensiun sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
2	Berkurangnya pengaduan Masyarakat terhadap SDM Kejaksaan RI	Persentase SDM Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin	4%
3	Meningkatnya kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan Kejaksaan RI	Persentase layanan perbendaharaan sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan pendapatan dan piutang negara sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran PNBP sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan umum keuangan sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kejaksaan RI	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kejaksaan RI	80
5	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas Perencanaan dan penggunaan anggaran Kejaksaan UKE I Kejaksaan RI	NKA Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	90,25
6	Meningkatnya kegiatan perencanaan yang meliputi pengelolaan data, penyusunan rencana anggaran dan program kerja, pemantauan dan evaluasi, pengembangan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan RI	Persentase layanan pengelolaan data sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan penyusunan rencana anggaran dan program kerja sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan pemantauan dan evaluasi sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan organisasi dan tata laksana sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
		Persentase layanan reformasi birokrasi sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Persentase satker Kejaksaan RI yang mendapat pendampingan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	40%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satker Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	95,5
8	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Organisasi UKE I Kejaksaan yang tepat fungsi	Persentase implementasi RB UKE I berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik	85%
9	Meningkatnya kegiatan analisis kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kejaksaan RI	Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
10	Meningkatnya kegiatan pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi	Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
11	Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase layanan dukungan satker	100%
		Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
12	Meningkatnya kualitas ASN Kejaksaan yang berakhlak	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen ASN	3,7
13	Meningkatnya kualitas layanan keuangan di lingkungan Kejaksaan RI	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan keuangan	3,7
14	Meningkatnya kualitas layanan umum di lingkungan Kejaksaan RI	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Sub Bagian umum	3,7
15	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen di lingkungan Kejaksaan RI	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan dukungan manajemen Satker UKE I	3,7
16	Meningkatnya kualitas layanan publik Kejaksaan RI	Persentase satker yang melaksanakan survey kepuasan layanan publik	100%
		Indeks kepuasan layanan publik Kejaksaan RI	3,7

No	Kegiatan	Anggaran
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.719.457.000
2	Gaji dan Tunjangan	6.016.984.000
	Jumlah	7.736.441.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Muara Bulian, 06 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Pembinaan,	Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian Dan Keuangan Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Moh Zulkarnain Yusuf, S.H., M.M.)	(Santi Apriani, S.H)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Suryaningsih
Jabatan	:	Kepala Urusan Perlengkapan, Daskrimti dan Perpustakaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Moh Zulkarnain Yusuf, S.H., M.M.
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Pembinaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 06 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Pembinaan	Kepala Urusan Perlengkapan Daskrimti dan Perpustakaan
(Moh Zulkarnain Yusuf, S.H., M.M.)	(Suryaningsih)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Persentase layanan pengelolaan barang milik negara sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
2	Meningkatnya kegiatan pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi	Persentase layanan pengelolaan data dan statistik kriminal	100%
		Persentase layanan penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
3	Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase layanan pemeliharaan dan implementasi sistem informasi pada seluruh satker Kejaksaan RI sesuai SLA (Service Level Agreement)	100%
4	Meningkatnya kualitas layanan manajemen Barang Milik Negara dan pengadaan di Lingkungan Kejaksaan RI	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan	3,7
5	Meningkatnya jumlah gedung kantor, rumah negara, kendaraan jabatan, operasional, dan fungsional, perangkat pengolah data dan komunikasi, perlengkapan dan fasilitas perkantoran yang memadai	Persentase gedung kantor yang direhabilitasi	60%
		Persentase rumah negara yang direhabilitasi	60%
		Persentase pembangunan *gedung kantor satuan kerja* yang baru	40%
		Persentase pembangunan rumah negara baru	10%
		Persentase pengadaan mobil jabatan dan operasional	60%
		Persentase pengadaan mobil tahanan dan mobil fungsional lainnya	60%
		Persentase pengadaan sepeda motor dinas	60%
		Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	60%
		Persentase pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran	75%
		Persentase terpenuhi sarana/prasarana intelijen dan penegakan hukum	75%
6	Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI	Persentase Terpenuhinya Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI	60%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Persentase Terpenuhinya Peralatan Sarana Intelijen di Kejaksaan RI	60%
		Persentase Terpenuhinya Kendaraan Fungsional Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI	40%
		Persentase Terpenuhinya Kendaraan Tahanan Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI	60%
		Persentase Terpenuhinya Peralatan Perkantoran Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI	60%
		Persentase terpenuhinya Pembangunan Rupbasan di Kejaksaan RI	30%
		Persentase Terpenuhinya Pusat Kendali Operasi Kejaksaan RI	60%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.719.457.000
	Jumlah	Rp 1.719.457.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Muara Bulian, 06 Februari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Pembinaan	Kepala Urusan Perlengkapan Daskrimti dan Perpustakaan
(Moh Zulkarnain Yusuf, S.H., M.M.)	(Suryaningsih)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Selvi Riyani, S.H., M.H.
Jabatan	:	Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Tito Supratman, S.H.
Jabatan	:	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum,	Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum,
(Tito Supratman, S.H.)	(Selvi Riyani, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang A (Bidang tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang)	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A yang diproses hingga Penuntutan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	92%
2	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang B (Bidang bidang tindak	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B yang diproses hingga Penuntutan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang)	tindak pidana umum bidang B yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	92%
3	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang C (bidang tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang)	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C yang diproses hingga Penuntutan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	92%
4	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang D (Bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang)	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D yang diproses hingga Penuntutan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	92%
5	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang E (Bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah, tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang)	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E yang diproses hingga Penuntutan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	92%
6	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A (Bidang tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif	82%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B (Bidang tindak pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif	82%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C (bidang tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang)	82%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		pada penuntutan melalui keadilan restoratif	
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D (bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif	82%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E (bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah, tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang) pada penuntutan melalui keadilan restoratif	82%
7	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	82%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	82%
8	Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum di Kejagung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Negeri	3,7
		Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Kejaksaan Negeri	91%
9	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase penyelesaian laporan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri	91%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penuntutan	Rp 42.042.000
2	Eksekusi	Rp 3.150.000
3	Restorative Justice	Rp 1.769.000
Jumlah		Rp 46.961.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum,	Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum,
(Tito Supratman, S.H.)	(Selvi Riyani, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Azzkya Mursalim, S.H.
Jabatan	:	Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Tito Supratman, S.H.
Jabatan	:	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum,	Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum,
(Tito Supratman, S.H.)	(Azzkya Mursalim, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang A (Bidang tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang)	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang A yang diproses hingga Pra-Penuntutan	91%
2	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang B (Bidang bidang tindak	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang B yang diproses hingga Pra-Penuntutan	91%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	pidana narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang)		
3	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang C (bidang tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang)	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang C yang diproses hingga Pra-Penuntutan	91%
4	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang D (Bidang tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang)	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang D yang diproses hingga Pra-Penuntutan	91%
5	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum Bidang E (Bidang tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah, tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya, dan pencucian uang)	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum bidang E yang diproses hingga Pra-Penuntutan	91%
6	Meningkatnya akuntabilitas penanganan perkara	Tingkat penyelesaian pelaporan pelaksanaan penanganan perkara secara akuntabel	100%
7	Meningkatnya efektivitas kolaborasi penanganan perkara lintas sektor (APH)	Tingkat penyelesaian perkara pidana umum yang berasal PPNS	81%
8	Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra Penuntutan	82%
9	Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum di Kejagung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Negeri	3,7
		Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Kejaksaan Negeri	91%
10	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri	Persentase penyelesaian laporan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri	91%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	dan Cabang Kejaksaan Negeri		

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra Penuntutan	Rp 3.915.000
Jumlah		Rp 3.915.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum,	Kepala Subseksi Subseksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum,
(Tito Supratman, S.H.)	(Azzkya Mursalim, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	SHAHNAZ NATASHA, S.H.
Jabatan	:	KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	BILLIE CHRISTOPHER SITOMPUL, S.H., M.H.
Jabatan	:	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,	Pihak Pertama, Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus,
(Billie Christopher Sitompul, S.H., M.H.)	(Shahnaz Natasha, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipikor dan TPPU	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	91%
2	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipidsus (Perpajakan) dan TPPU	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Perpajakan) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	91%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
3	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipidsus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	91%
4	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan TPPU	Tingkat penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	91%
5	Meningkatnya penyelesaian pengendalian operasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat penyelesaian tindak lanjut penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	91%
		Tingkat penyelesaian kegiatan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.	91%
		Tingkat penyelesaian kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.	91%
6	Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Negeri	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Negeri	3,7
		Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Kejaksaan Negeri	91%
7	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase penyelesaian laporan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, di Kejaksaan Negeri Batang Hari	91%

No	Kegiatan	Anggaran
1	PENYELIDIKAN	Rp 5.965.000
2	PENYIDIKAN	Rp 20.244.000
Jumlah		Rp 26.209.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,	Pihak Pertama, Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus,
(Billie Christopher Sitompul, S.H., M.H.)	(Shahnaz Natasha, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**AFRIALDI, S.H.**
Jabatan	:	KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	:	**BILLIE CHRISTOPHER SITOMPUL, S.H., M.H.**
Jabatan	:	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 11 Agustus 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI

Perjanjian ini telah diverifikasi Pimpinan via MySimkari
Oleh: BILLIE CHRISTOPHER SITOMPUL, S.H., M.H.

BILLIE CHRISTOPHER SITOMPUL, S.H., M.H.
NIP. 198308272008121001

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI

Perjanjian ini telah diajukan Elektronik Via MySimkari
Oleh: AFRIALDI, S.H.

AFRIALDI, S.H.
NIP. 199604202022031003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Negeri	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Negeri	**3,7**
		Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Kejaksaan Negeri	**91%**
2	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipikor dan TPPU	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	**91%**
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	**91%**
3	Meningkatnya penyelesaian pengendalian operasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat penyelesaian kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.	**91%**
		Tingkat penyelesaian kegiatan operasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.	**91%**
		Tingkat penyelesaian tindak lanjut penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	**91%**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase penyelesaian laporan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, di Kejaksaan Negeri Batang Hari	**91%**

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 11 Agustus 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI

Perjanjian ini telah diverifikasi Pimpinan via MySimkari
Oleh: BILLIE CHRISTOPHER SITOMPUL, S.H., M.H.

BILLIE CHRISTOPHER SITOMPUL, S.H., M.H.
NIP. 198308272008121001

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI

Perjanjian ini telah diajukan Elektronik Via MySimkari
Oleh: AFRIALDI, S.H.

AFRIALDI, S.H.
NIP. 199604202022031003

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	SAMUEL JOSHIDA, S.H.
Jabatan	:	KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA, DAN EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	BILLIE CHRISTOPHER SITOMPUL, S.H., M.H.
Jabatan	:	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,	Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus,
(Billie Christopher Sitompul, S.H., M.H.)	(Samuel Joshida, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipikor dan TPPU	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	91%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan	91%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
2	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipidsus (Perpajakan) dan TPPU	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Perpajakan) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Perpajakan) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	91%
3	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tipidsus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU	Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara tindak pidana khusus (Kepabeanan, Cukai) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	91%
4	Meningkatnya penyelesaian penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan TPPU	Tingkat penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	91%
		Tingkat penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	91%
5	Meningkatnya penyelesaian pengendalian operasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat penyelesaian kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus.	91%
6	Meningkatnya penyelesaian pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat penyelesaian perkara tipikor dan TPPU yang berdampak pada pengembalian kerugian negara	91%
7	Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum di Kejagung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Negeri	3,7
		Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Kejaksaan Negeri	91%
8	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase penyelesaian laporan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	91%

No	Kegiatan	Anggaran
1	PRA PENUNTUTAN	Rp 1.026.000
2	PENUNTUTAN	Rp 8.177.000
3	EKSEKUSI	Rp 382.000
Jumlah		Rp 9.585.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,	Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus,
(Billie Christopher Sitompul, S.H., M.H.)	(Samuel Joshida, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	AMIN LUTFI, S.H.
Jabatan	:	KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	MULKAN BALYA, S.H., M.H.
Jabatan	:	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara,	Pihak Pertama, Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara,
(Mulkan Balya, S.H., M.H.)	(Amin Lutfi, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara perdata	Tingkat penyelesaian perkara perdata	91%
2	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara Tata Usaha Negara (TUN)	Tingkat penyelesaian perkara Tata Usaha Negara	91%
3	Terpenuhinya penyelesaian pelayanan hukum	Persentase penyelesaian pelayanan hukum	95,5%
4	Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum di	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Negeri	3,7

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Kejagung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		
		Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Kejaksaan Negeri	91%
5	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase penyelesaian laporan penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri	91%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Perkara Perdata dan TUN	Rp 5.657.000
Jumlah		Rp 5.657.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara,	Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara,
(Mulkan Balya, S.H., M.H.)	(Amin Lutfi, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	PRANA SURYA RAMADHAN, S.H.
Jabatan	:	KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	MULKAN BALYA, S.H., M.H.
Jabatan	:	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara,	Pihak Pertama, Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum,
(Mulkan Balya, S.H., M.H.)	(Prana Surya Ramadhan, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)	3,7
2	Terpenuhinya penyelesaian pelayanan hukum	Persentase penyelesaian pelayanan hukum	95,5%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
3	Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum di Kejagung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Negeri	3,7
		Persentase layanan bidang penegakan hukum sesuai dengan standar layanan di Kejaksaan Negeri	91%
4	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase penyelesaian laporan penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, perkara koneksitas di Kejaksaan Negeri	91%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Hukum Gratis	Rp 1.350.000
2	Pertimbangan Hukum	Rp 445.000
3	Pengelolaan HALO JPN	Rp 1.125.000
4	Pendampingan Pengelolaan Dana Desa	Rp 4.420.000
Jumlah		Rp 7.340.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara,	Pihak Pertama, Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum,
(Mulkan Balya, S.H., M.H.)	(Prana Surya Ramadhan, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Rezky Utomo, S.H., M.H.
Jabatan	:	Kepala Subseksi II pada Seksi Intelijen

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, S.H., M.H.
Jabatan	:	Kepala Seksi Intelijen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Seksi Intelijen,	Kepala Subseksi II pada Seksi Intelijen
(Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, S.H., M.H.)	(Rezky Utomo, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Meningkatnya efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Tingkat efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan	75%
		Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen	10

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
2	Meningkatnya penyelesaiaan kegiatan/operasi Intelijen penegakan hukum dalam mendukung keberhasilan penanganan perkara	Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penyelidikan	85%
		Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penyidikan	85%
		Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap pra penuntutan	85%
		Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penuntutan	85%
		Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap eksekusi putusan hukum	85%
3	Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat	Tingkat Efektivitas Penerangan Hukum Masyarakat	82%
		Tingkat Efektivitas Penyuluhan Hukum Masyarakat	82%
4	Meningkatnya koordinasi antar institusi penegak hukum	Jumlah kegiatan koordinasi antar institusi penegak hukum dalam penanganan perkara	3
5	Meningkatnya operasi intelijen di bidang pengamanan pembangunan strategis	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	83%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan	Rp 940.000
Jumlah		Rp 940.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Seksi Intelijen,	Kepala Subseksi II pada Seksi Intelijen
(Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, S.H., M.H.)	(Rezky Utomo, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Dimas Febry Kustantyo, S.H.
Jabatan	:	Kepala Subseksi I pada Seksi Intelijen

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, S.H., M.H.
Jabatan	:	Kepala Seksi Intelijen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Seksi Intelijen,	Kepala Subseksi I pada Seksi Intelijen
(Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, S.H., M.H.)	(Dimas Febry Kustantyo, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATANG HARI
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Tingkat efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan	75%

		Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen	10
		Jumlah laporan hasil kegiatan posko intelijen	0
		Jumlah laporan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat	4
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelacakan aset	4
		Jumlah laporan kegiatan pencarian DPO	0
2	Meningkatnya penyelesaiaan kegiatan/operasi Intelijen penegakan hukum dalam mendukung keberhasilan penanganan perkara	Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penyelidikan	85%
		Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penyidikan	85%
		Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap pra penuntutan	85%
		Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penuntutan	85%
		Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap eksekusi putusan hukum	85%
3	Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat	Tingkat Efektivitas Penerangan Hukum Masyarakat	82%
		Tingkat Efektivitas Penyuluhan Hukum Masyarakat	82%
4	Meningkatnya koordinasi antar institusi penegak hukum	Jumlah kegiatan koordinasi antar institusi penegak hukum dalam penanganan perkara	3

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp 2.707.000
2	Kampanye Anti Korupsi	Rp 1.837.000
3	Penerangan Hukum	Rp 1.865.000

4	Jaksa Masuk Sekolah	Rp 10.460.000
5	Jaksa Menyapa	Rp 18.880.000
Jumlah		Rp 35.749.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas Direktif Kepala Kejaksaan Tinggi

Muara Bulian, 09 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Seksi Intelijen,	Kepala Subseksi I pada Seksi Intelijen
(Michael Yandi Pangihutan Tampubolon, S.H., M.H.)	(Dimas Febry Kustantyo, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**RIZKY PERTAMAWAN, S.H.**
Jabatan	:	KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	:	**MICHAEL YANDI PANGIHUTAN TAMPUBOLON, S.H., M.H.**
Jabatan	:	KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Bulian, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI

Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: MICHAEL YANDI PANGIHUTAN TAMPUBOLON, S.H., M.H.

MICHAEL YANDI PANGIHUTAN TAMPUBOLON, S.H., M.H.
NIP. 198501282008121001

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI

Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: RIZKY PERTAMAWAN, S.H.

RIZKY PERTAMAWAN, S.H.
NIP. 199401212022031003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Meningkatnya efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/ penggalangan kasus intelijen	**10%**
		Tingkat efektivitas dukungan intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan	**75%**
2	Meningkatnya koordinasi antar institusi penegak hukum	Jumlah kegiatan koordinasi antar institusi penegak hukum dalam penanganan perkara	**3**
3	Meningkatnya operasi intelijen di bidang pengamanan pembangunan strategis	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	**83%**
4	Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat	Tingkat Efektivitas Penerangan Hukum Masyarakat	**82%**
		Tingkat Efektivitas Penyuluhan Hukum Masyarakat	**82%**
5	Meningkatnya penyelesaiaan kegiatan/operasi Intelijen penegakan hukum dalam mendukung keberhasilan penanganan perkara	Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap eksekusi putusan hukum	**85%**
		Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penuntutan	**85%**
		Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penyelidikan	**85%**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap penyidikan	**85%**
		Tingkat penyelesaian kegiatan/operasi intelijen penegakan hukum pada tahap pra penuntutan	**85%**

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Muara Bulian, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI

Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: MICHAEL YANDI PANGIHUTAN TAMPUBOLON, S.H., M.H.

MICHAEL YANDI PANGIHUTAN TAMPUBOLON, S.H., M.H.
NIP. 198501282008121001

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BATANGHARI

Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: RIZKY PERTAMAWAN, S.H.

RIZKY PERTAMAWAN, S.H.
NIP. 199401212022031003